

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia negara dengan potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang sudah mulai diperhatikan oleh dunia Internasional. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi yang nyata dari sektor perbankan. Peranan dan fungsi lembaga perbankan dalam kegiatan perekonomian negara merupakan lembaga pemberi jasa keuangan yang mendukung kegiatan sektor riil, termasuk kegiatan dalam transaksi serta perdagangan Internasional.

Menurut Latumaerissa(2013) dalam Fitria (2014) Bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki kegiatan utama menerima simpanan dari masyarakat maupun pihak lain, yang kemudian dialokasikan kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank umum menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yaitu sebagai berikut :
“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Melihat fungsinya, bank umum memiliki fungsi yang sangat besar bagi perekonomian negara, yaitu menghimpun dana yang sementara tidak digunakan untuk dipinjamkan kepada pihak lain, atau

menukar dengan surat-surat berharga (*financial investment*), menyederhanakan lalu lintas pembayaran uang, melindungi keamanan uang masyarakat yang sementara belum dipergunakan, contohnya untuk mencegah risiko hilang, kebakaran dan lain-lain, serta mengadakan kredit. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari sektor perbankan. Hal tersebut dikarenakan bank merupakan salah satu sarana yang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, dimana peran penting tersebut yaitu sebagai lembaga perantara yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank juga memiliki fungsi sebagai agen kepercayaan, yang berarti bisnis aktivitas bank mengandalkan kepercayaan masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat maka bank harus bisa menjaga, memperbaiki dan menjaga kinerja keuangan tetap bagus (Hantono, 2017). Peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari permasalahan kredit. Bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan. Pada intinya perusahaan atau perorangan membutuhkan kredit apabila kondisi antara cashflow-masuk dan cashflow-keluar berjalan tidak seimbang pada saat tertentu atau pada kurun waktu tertentu. Lebih besar dana keluar dibandingkan dana masuk (Maryanto, 2011).

Dengan menyebarnya penyaluran kredit, maka secara langsung pemerintah akan terbantu dengan menambahnya penerimaan pajak dari keuntungan yang berasal dari para nasabah dan bank, serta meluasnya lapangan pekerjaan apabila kredit dipergunakan untuk pembangunan usaha baru atau ekspansi usaha. Pertumbuhan kredit merupakan indikator keberhasilan bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediere yang menyalurkan dana himpunan bagi masyarakat.

Dalam menyalurkan kredit, bank dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bank terdiri dari kemampuan bank dalam menghimpun dana, financial position (CAR, NPL, EDF, LLP, ATMR, batas maksimum pemberian kredit), kualitas aktiva produktifnya dan faktor produksi yang tersedia di bank. Faktor eksternal yaitu terdiri dari peraturan moneter yang berlaku, persaingan, situasi sosial politik, karakteristik usaha nasabah, suku bunga yang ditetapkan Bank Sentral dan lain sebagainya (Teguh Pudjo Muljono, 2006). Salah satu faktor internal dalam penyaluran kredit perbankan adalah rasio permodalan atau biasa disebut Capital Adequacy Ratio (CAR).

Capital Adequacy Ratio adalah rasio antara modal bersih yang dimiliki bank dengan jumlah asetnya (Hantono, 2017). Berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia No.15/21/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan Standar Internasional. Setiap bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam Capital Adequacy Ratio (CAR). Dilihat dari struktur permodalannya, modal bank terutama bersumber dari ekuitas. Dengan struktur permodalan bank yang lebih didominasi oleh modal inti, diharapkan ketahanan bank dalam menyerap risiko yang muncul dari kegiatan usaha bank atau perubahan lingkungan bisnis bank menjadi lebih baik. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan

mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penawaran kredit (Ghalih, 2014).

Berdasarkan penelitian Kharisma dan Sri (2017) bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan. Akan tetapi temuan lain oleh Pratama (2010) menghasilkan bahwa CAR memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kredit perbankan. Lain halnya menurut Zulcha dan Dewi (2016) yang mengungkapkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada Bank Persero. Besarnya CAR akan memengaruhi besarnya tingkat penyaluran kredit yang akan disalurkan kepada masyarakat. Sehingga Bank Umum berlomba-lomba untuk memenuhi tingkat CAR agar maksimal dan kebutuhan debitur dapat terpenuhi. Tingkat risiko kredit perbankan diukur salah satunya menggunakan Non Performing Loan.

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan, untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam rangka menghasilkan keuntungan secara keseluruhan (Hantono, 2017). Pengertian risiko kredit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ POJK/ 2016 Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Dari kasus-kasus yang pernah terjadi, umumnya kredit bermasalah timbul dari penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan semula dan

jumlah plafon yang tidak sesuai dengan kebutuhan (Maryanto, 2010). Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. NPL melibatkan banyak waktu dan usaha pengelolaan bank. Hal ini merupakan biaya tidak langsung yang harus ditanggung bank karena kualitas asetnya yang buruk. NPL tidak hanya memblokir pendapatan bunga, tetapi juga didapatkan kesempatan investasi yang merugi, sehingga memengaruhi arus keuntungan di masa depan. NPL menyiratkan pemblokiran pendapatan yang menghambat bank terhadap uang tunai yang ada. Oleh karena itu, ketika NPL bank tinggi maka bank dipaksa untuk meminjam lebih banyak pada bank lain atau mencari pinjaman dan ini menghasilkan biaya tambahan/ biaya bunga bagi bank (Yuga, 2016). Sehubungan dengan hal itu tidaklah mudah berbisnis dalam dunia perbankan, banyak hambatan dan risiko yang dihadapi, terutama pada kegiatan penyaluran kredit.

Secara mutlak sulit untuk mengelak dari kredit bermasalah, akan tetapi setiap bank harus tetap berusaha untuk menekan sekecil mungkin risiko terjadinya kredit bermasalah. Laba yang menurun akan membuat aktivitas bank menjadi tersendat, baik laba ditahan yang berkurang maupun deviden yang harusnya dibagikan kepada investor menjadi berkurang. Pendapatan terbesar dalam bank yang dapat memengaruhi modal bank adalah pendapatan bunga yang berasal dari penyaluran kredit. Hal tersebut dikarenakan oleh peningkatan penyaluran kredit yang diperoleh berupa pendapatan bunga meningkat, seiring perolehan pendapatan yang meningkat maka dapat meng-cover seluruh beban termasuk NPL. Selepas pemasukan dikurangi NPL baru diperoleh laba, dimana

penambahan laba tersebut akan berdampak pada pertumbuhan modal perbankan. Lantaran penyaluran kredit mendistribusikan pemasukan yang sangat besar maka setiap bank membentuk kebijakan penyaluran kredit yang bervariasi. Hal ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan jumlah modal, meskipun pemasukan bank yang lainnya dapat diperoleh selain dari bunga, misalnya biaya administrasi tabungan dan jasa transfer. Berdasarkan penelitian Kharisma dan Sri (2017) mengungkapkan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan. Sementara itu hasil penelitian oleh Zulcha dan Dewi (2016) penelitian ini menghasilkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap kredit perbankan. Besarnya NPL ini harus sebanding dengan besarnya modal atau CAR, karena tanpa modal yang besar maka risiko kegagalan kredit tidak akan dapat tercover. NPL yang tinggi akan menyebabkan menurunnya laba yang diterima oleh bank maupun deviden yang harus diterima oleh investor.

Risiko lain dalam perbankan yang dapat menjadikan faktor penentu besar kecilnya penyaluran kredit yaitu Expected Default Frequency atau probabilitas kegagalan bank. Risiko ini adalah potensi risiko gagal membayar pokok obligasi atau kupon oleh penerbit obligasi tersebut. Menurut Anang (2012) selain kerugian dari risiko gagal bayar, investor obligasi jangka pendek dapat menghadapi kerugian yang lainnya dikarenakan nilai pasar dari obligasi tersebut anjlok atau lebih rendah daripada harga obligasi yang dimiliki tersebut. Perusahaan perbankan di Indonesia secara global memiliki expected default frequency yang lebih tinggi diantara perusahaan industri lain (Manurung, 2005). Sehingga tingginya EDF tersebut dapat memengaruhi penyaluran kredit perbankan tersebut. EDF

merupakan variabel forward looking, artinya penelitian dimulai dari variabel penyebab atau faktor risiko, kemudian diikuti akibatnya pada waktu yang akan datang (Altunbas, 2009). Ronal Colin dan Syarief Fauzie(2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam perbankan Expected Default Frequency disebut juga probabilitas kegagalan bank yang muncul akibat besarnya obligasi yang diterbitkan dan besarnya biaya bunga untuk mendapatkan dana pinjaman. Dana pinjaman yang diterima tersebut selanjutnya dialihkan oleh bank dalam menggerakkan kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit. Bank memiliki rata-rata EDF bank di kuartil keempat (yaitu EDF tertinggi = 1,13%). Sebuah bank "berisiko rendah" memiliki rata-rata EDF bank dalam kuartil pertama (EDF terendah = 0,38) (Yanar Altunbas, Leonardo Gambacorta dan David Marques; 2009). Fitur ini sesuai dengan kenyataan bahwa bank kecil atau bank yang memiliki keterbatasan modal dianggap lebih banyak berisiko oleh pasar dan membutuhkan stok sekuritas yang lebih besar karena keterbatasannya dalam menyalurkan kredit. Tingkat kapitalisasi yang lebih rendah tampaknya konsisten dengan risiko yang lebih tinggi. Namun rasio modal keasetan standar yang digunakan ini bukanlah ukuran terbaik dari keberagaman portofolio bank yang akan digunakan secara lebih efektif dengan ukuran modal tertimbang terhadap risiko (Gambacorta dan Mistrulli, 2004).

Dari berbagai risiko dan faktor internal yang berpengaruh dalam penyaluran kredit terdapat cara yang dapat dilakukan bank dalam rangka mengurangi risiko kredit yaitu dengan mengalokasikan dananya pada instrumen lain atau faktor eksternal yaitu penempatan dana pada Bank Indonesia. Hal ini

tentunya dapat meminimalisir tingkat risiko dibandingkan dengan menyalurkan langsung kepada nasabah. Faktor eksternal yang memengaruhi penyaluran kredit salah satunya adalah SBI. Penempatan dana pada Bank Indonesia yang berbentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah instrumen yang terjamin keamanannya, lantaran diterbitkan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan instrumen yang sangat digemari oleh perusahaan atau lembaga keuangan karena dirasa paling aman dan memberikan cadangan likuiditas sekunder yang mampu memberikan kepastian hasil. Dengan demikian kredit juga memiliki keterkaitan dengan SBI. Menurut Fathul (2013) kredit sebagai salah satu transmisi kebijakan moneter memiliki keterkaitan dengan penetapan suku bunga SBI. Penurunan suku bunga SBI penting dan menjadi penentu bagi penurunan bunga bank pada umumnya, terutama kredit. Penurunan bunga kredit diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit sehingga mendorong pergerakan di sektor riil dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Rusdianto (2012) yang menyatakan bahwa peningkatan atau penurunan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia memberikan dampak yang negatif atau positif terhadap penyaluran kredit.

Melambatnya pertumbuhan kredit di Indonesia salah satunya disebabkan karena masih tingginya tingkat suku bunga SBI yang mendorong perbankan untuk menyimpan lebih banyak dana pihak ketiga dalam bentuk SBI, kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan penyaluran kredit oleh perbankan dan perbankan memilih untuk menaruh dana di Sertifikat Bank Indonesia

dibandingkan dengan memberikan pinjaman kepada bank lain yang kekurangan likuiditas atau untuk disalurkan langsung kepada masyarakat, dengan alasan tersebut yang membuat penempatan SBI sebagai mediasi didasarkan pada alur pikir bahwa efektifnya kebijakan moneter (SBI) dalam hal kecukupan modal. Apabila rasio permodalan dalam suatu bank tinggi, bank cenderung mengalokasikan dananya ke masyarakat dibandingkan ke Sertifikat Bank Indonesia, karena bunga dari kredit lebih besar dibandingkan bunga SBI. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya SBI ini akan mendukung kelancaran kredit yang akan disalurkan ke masyarakat. Berdasarkan penelitian oleh Ronal Colin dan Syarief Fauzie (2014) ditemukan bahwa variabel CAR terhadap penyaluran kredit yang dimoderasi oleh suku bunga SBI didapatkan hasil yang tidak signifikan.

Selain itu SBI sebagai variabel moderasi antara risiko kredit bermasalah dengan penyaluran kredit didasarkan pada alur bahwa bank akan lebih memilih menyimpan dananya ke Bank Indonesia dalam bentuk SBI untuk menghindari risiko kredit bermasalah (NPL) bank yang tinggi, sehingga SBI dalam memoderasi NPL dengan penyaluran kredit memiliki sifat memperkuat NPL dan memperlemah penyaluran kredit ke nasabah oleh karena tingginya variabel NPL. Apabila risiko kredit bermasalah pada suatu bank tinggi, maka penyaluran dana bank ke SBI akan tinggi.

SBI sebagai variabel moderasi antara probabilitas kegagalan (EDF) dengan variabel dependen yaitu penyaluran kredit didasarkan pada alur bahwa pada saat bank tidak mampu membayar pinjaman jangka panjang (obligasi)

maupun bunga obligasi kepada investor, maka jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat akan menurun karena cash out flow bank bertambah untuk mengembalikan pinjaman jangka panjang obligasi yang sudah jatuh tempo. Dengan terdapatnya SBI sebagai variabel moderasi, pada kondisi bank yang krisis atau sedang mengalami risiko kegagalan (default) bank akan cenderung mengalokasikan dananya untuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dibandingkan dengan menyalurkan dananya untuk kredit nasabah yang cenderung memiliki banyak risiko. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SBI dalam memoderasi EDF terhadap penyaluran kredit memiliki sifat memperkuat variabel EDF yang berujung pada memperlemah atau berkurangnya penyaluran kredit. Berdasarkan hasil penelitian Ronal Colin (2014) variabel expected default frequency terhadap penyaluran kredit yang dimoderasi oleh suku bunga Sertifikat Bank Indonesia didapatkan hasil yang negatif signifikan, artinya suku bunga SBI memoderasi hubungan Expected Default Frequency terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji penelitian ini dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan pada Bank Umum Periode 2013-2016”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana pengaruh Capital to Asset Ratio terhadap penyaluran kredit ?
2. Bagaimana pengaruh Non Performing Loans terhadap penyaluran kredit?

3. Bagaimana pengaruh Expected Default Frequency terhadap penyaluran kredit ?
4. Bagaimana pengaruh Capital to Asset Ratio, Non Performing Loans dan Expected Default Frequency terhadap penyaluran kredit perbankan dengan Sertifikat Bank Indonesia sebagai variabel moderasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui pengaruh Capital to Asset Ratio terhadap penyaluran kredit.
2. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Loans terhadap penyaluran kredit.
3. Untuk mengetahui pengaruh Expected Default Frequency terhadap penyaluran kredit.
4. Untuk mengetahui pengaruh Capital to Asset Ratio, Non Performing Loans dan Expected Default Frequency terhadap penyaluran kredit perbankan dengan Sertifikat Bank Indonesia sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyaluran kredit perbankan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memahami dan menerapkan teori yang sudah didapat, selain itu juga memberikan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu memperkuat daya

pikir ilmiah dan menumbuhkan kompetensi dalam disiplin ilmu yang didalami khususnya perihal penerapan teori risiko bank.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Untuk pelatihan intelektual yang diharapkan mampu memperkuat daya pikir ilmiah dan menumbuhkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang didalami khususnya tentang aplikasi teori risiko dan penyaluran kredit perbankan.

1.4.2.2 Bagi Pembaca

Meningkatkan pengetahuan dan wacana bagi pembaca perihal faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi penyaluran kredit. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur penyaluran kredit perbankan.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat Umum

Memberikan gambaran dan dedikasi konseptual bagi manajemen perusahaan untuk meminimalisir berlangsungnya kredit macet yang berkepanjangan, serta meluaskan penyaluran kredit bank.